

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang mengapa thesis ini ditulis, hal ini berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan thesis, studi pustaka, kerangka pemikiran, hipotesa, dan sistematika penulisan.

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Arus migrasi buruh di timur tengah memang bukanlah sesuatu yang baru. Migrasi di timur tengah sudah mulai terlihat sejak tahun 1930 an, namun arus migrasi yang begitu besar telah dimulai semenjak tahun 1970an terutama semenjak timur tengah terjadi ledakan sumber daya alam di bidang perminyakan. Hampir semua negara Timur Tengah terutama di bagian negara teluk yakni Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman berubah menjadi negara yang kaya raya. Hal tersebut berimplikasi terhadap jumlah migrasi yang berada di negara-negara tersebut. Tercatat dari sekian negara tersebut hampir rata-rata penduduknya yakni sebesar 70% merupakan warga asing.

Ditengah meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat di negara teluk, setidaknya mereka membutuhkan beberapa tipe pekerja diantaranya yang berbasis skill menengah terutama di bidang konstruksi dan juga industri yang memerlukan skill rendah dan juga berbasis skill tinggi terutama dibidang jasa. pekerja di bidang tersebutpun didominasi oleh pelerja yang berasal atau berdarah arab. Hal tersebut terjadi selama hampir empat dekade namun belakangan sekitar dua puluh tahun kebelakang pekerja di dominasi oleh warga dari daratan Asia terutama Asia Tenggara. Para agen pekerja selalu memenuhi dan menjaga kestabilan pekerja dari Asia Tenggara untuk di pasok di negara Teluk. Hal tersebut sangatlah menguntungkan berbagai pihak, bagi negara pengirim maka mereka akan mendapatkan cadangan devisa yang cukup besar dan bagi negara penerima akan mendapatkan pekerja yang cukup murah.<sup>1</sup> Namun di tengah banyaknya buruh migran yang membanjiri kawasan negara Teluk, sejumlah permasalahan pun muncul. Diantara permasalahan tersebut antarlain berkaitan dengan perilaku masyarakat negara

---

<sup>1</sup> Rooper, Steven D and Lilian A Barria. 2014. *Understanding variation in gulf migration and labor practice*. nd available from middle east law and governance 6 (2014) 32-52

teluk terhadap para pekerjanya terutama di sektor domestik. Hal-hal seperti penganiayaan, pemrosaan dan tidak dibayarkannya gaji sudah lazim terdengar di kehidupan buruh migran di Timur Tengah.

Selama bertahun-tahun negara-negara Teluk mengadopsi sebuah sistem perekrutan kerja yang bernama sistem kafala atau sistem sponsorship. Sistem ini merupakan sistem pokok perekrutan tenaga kerja di negara teluk meskipun setiap negara kemudian mempunyai regulasi lain terkait dengan buruh migran namun sistem kafala ini merupakan induk dari pada perekrutan tenaga kerja. sistem sponsor kafala adalah kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan populasi migran tenaga kerja sementara di negara-negara GCC. Kafala mengharuskan semua tenaga kerja sementara untuk memiliki sponsor lokal pejabat yang bertanggung jawab untuk visa imigrasi dan status tinggal di negara ini. sistem sponsor kafala secara langsung terkait dengan peraturan pekerjaan rumah tangga, dimana pemerintah GCC sering mengatur peraturan-pekerjaan tertentu dalam negeri. Sebagai contoh, di bawah perjanjian kontrak standar, pekerja rumah tangga secara hukum diharuskan untuk bekerja selama dua tahun dan sering mengenakan masa percobaan tiga bulan dengan majikan masing-masing. Selama masa kontrak pekerja di haruskan mematuhi segala peraturan majikan dan mengumpulkan semua dokumen terkait ke imigrasian<sup>2</sup>. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran hak yang terjadi di Timur Tengah, bahkan negara-negara Teluk dianggap sebagai negara tanpa perlindungan hak buruh migran.

Namun seiring berjalannya waktu negara-negara Timur Tengah mulai merubah regulasi tentang buruh migran. Hal ini tentu saja atas beberapa desakan yang mereka dapat dari berbagai organisasi internasional. Walaupun begitu negara-negara seperti Saudi Arabia, UAE, Oman, Kuwait dan Bahrain tetap mempertahankan regulasi yang merugikan buruh migran. Negara-negara tersebut hanya mengubah regulasi yang menguntungkan pekerja dibidang intelektual tidak untuk yang bersifat dark, dirty and dangerous. Akan tetapi tidak untuk negara Qatar. Qatar merupakan satu-satunya negara teluk yang mengubah regulasi buruh migran secara signifikan. Qatar juga meratifikasi sejumlah konvensi yang berkaitan dengan human trafficking dan kekerasan anak yang tidak diratifikasi oleh negara-negara teluk lainnya.

---

<sup>2</sup> Human Right Watch. 2014. I already brought You Abuse and Exploitation of Female Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates. nd

Pada awalnya Qatar yang sangat menolak mengubah regulasi tentang buruh migrannya karena berbagai alasan terutama berkaitan dengan masalah keamanan negara, memertahankan kebudayaan dan memertahankan kekayaan domestiknya karena seperti diketahui bahwa negara teluk ini mempunyai migran sebesar 90%, hal tersebutlah yang menyebabkan Qatar sulit berubah dalam menangani buruh migran.

Namun Qatar yang sebelumnya sangat keras menampik norma-norma internasional tentang buruh migran pada akhirnya mulai menyesuaikan diri dengan merubah sistem kafala yang selama ini melekat terhadap negara dengan GDP terbesar di dunia tersebut. Undang-undang tahun 2009 berkaitan dengan keluar masuknya resident di Qatar telah diubah menjadi undang-undang 2015 dimana sebutan untuk sponsor telah di ganti dengan sebutan Requirer. Tentu saja ini merupakan sebuah langkah maju Qatar dalam memperbaiki regulasi buruh migran yang baru. Hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang menyebabkan Qatar mengubah regulasinya berkaitan dengan buruh migran.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas mengenai pelanggaran-pelanggaran buruh migran di Timur Tengah dan juga mulai terbukanya Qatar tentang regulasi Buruh migran untuk dapat mengubah kebijakannya maka penelitian ini mengambil *research question* :

“mengapa Qatar mengubah regulasi tentang buruh migran?”

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan riset ini adalah:

- a. Untuk menginventarisasi faktor-faktor yang menyebabkan pergantian regulasi buruh migran Qatar.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan buruh migran yang ada di Qatar dengan negara GCC.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan opportunity yang lebih baik terhadap perlindungan buruh migran

- d. Untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang di pandang kurang dalam menyikapi permasalahan buruh migran.

## D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu dasar dari pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat dan instansi terkait.
- b. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti penyedia jasa buruh migran swasta dan masyarakat yang ada di Indonesia.
- c. Memberikan influence terhadap peneliti-peneliti lainnya untuk melakukan riset-riset lain mengenai buruh migran mengingat masih minimnya penelitian yang khusus membahas tentang kebijakan buruh migran Indonesia. Sehingga dengan banyaknya riset di harapkan dapat membantu memajukan buruh migran Indonesia

## E. STUDI PUSTAKA

Dalam melakukan penulisan tesis ini penulis mencoba memberikan perbandingan tulisan ini dengan tulisan lain yang berkaitan tentang buruh migran terutama mengenai buruh migran di Timur Tengah. Selain itu penulis juga mencoba me review beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sebuah organisasi non goverment terhadap kebijakan sebuah negara. Memang sangat terbatas penelitian yang berkaitan tentang tema yang ingin ditulis oleh penulis namun sejumlah penelitian yang di temukan cukup untuk membuat gagasan baru tentang studi hubungan internasional.

Adapun Studi pustaka yang di gunakan dalam menjawab mengapa Qatar mengubah regulasi tentang buruh migran antara lain, penelitian dari andrew garner dkk yang meneliti tentang Labour migran and access to justice in contemporary Qatar dalam penelitian itu dijelaskan bahwa buruh migran di Qatar mengalami kekerasan dan pelanggaran hak-hak yang disebabkan oleh lemahnya peraturan tentang perburuhan di Qatar dan juga lemahnya pengawasan terhadap agen-agen perekrut tenaga kerja.

Lebih lanjut amnesty Internasional melaporkan bahwa sumber dari berbagai kekerasan di Qatar adalah lemahnya regulasi terutama sistem sponsor yang menyebabkan banyak pelanggaran buruh migran terjadi, namun desakan beberapa pihak seperti negara mampu merubah sikap Qatar dengan menandatangani beberapa bilateral agreement. Akan tetapi hal tersebut belum bisa melindungi hak-hak buruh migran karena dalam prakteknya masih banyak terdapat pelanggaran yang menimpa para pekerja. Jadi dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Qatar berubah dalam aspek yang minor terhadap regulasi buruh migran karena desakan negara dan beberapa aktor internasional.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Sarah Spencer dkk yang meneliti *The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies: Report on Research Findings in the United Kingdom, Ireland, Canada and the United States* tentang bagaimana migran care kemudian mengkonstruksi negara-negara maju untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan dalam menghadapi buruh migran. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan regulasi negara-negara tersebut dipengaruhi oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang buruh migran.

Dan penelitian yang dilakukan oleh profesor Liliana Abaria dan DR Steven Rooper dalam journal berjudul *Understanding Violation in Gulf Migration and Labor Practice* yang melihat bahwa pelanggaran hak-hak buruh migran di timur tengah meliputi banyak faktor mulai dari regulasi dan cara perkrutan, selain itu mengapa kebijakan berubah juga meliputi banyak faktor terdapat pula perubahan kebijakan dilakukan karena konflik Arab dan non Arab. Hal-hal tersebut merupakan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Untuk mempermudah pemahaman penulis merangkum beberapa buku untuk menjawab mengapa Qatar mengubah kebijakannya :

Tabel 1.1 studi pustaka

No	Nama dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Metode	Jawaban yang diperoleh
1	Andrew Garner, University of Puget	Labour Migrants and Access to Justice in	Penelitian berdasarkan forum	Menjelaskan Tantangan-tantangan

	Sound Silvia Pessoa, Carnegie Mellon University Qatar Laura Harkness	Contemporary Qatar	group discussion, literatur review, kebijakan negara, undang-undang dan studi lapangan.	yang dihadapi para buruh migran, mekanisme bagi penegakan hak dan pencarian kompensasi dan kerugian yang dialami Para buruh migran.
2	Amnesty International.2014	<i>my sleep is my break, exploitation of domestic worker in Qatar</i>	Studi pustaka menggunakan data-data lapangan dan sekunder yang di ambil dari dokumen-dokumen yang berasal dari Qatar maupun peneliti lainnya.	Menghasilkan studi tentang kebijakan pemerintah qatar tentang buruh migan dan perkembangan regulasinya.
3	Amnesty International (2013)	The dark side of migration :spotlight of qatar cunstruction ahead the world cup	Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif, menggunakan purpose samping untuk mewawancarai buruh migran yang berda maupun yang sudah tidak di qatar. Selain itu juga menggunakan dokumen-dokumen terkait.	Ditemukan beberapa pelanggaran hak buruh migran terutama yang bekerja di sektor konstruksi yang akan di guanakan untuk menyambut piala dunia. Pemerintah qatar belu mampu menjamin dan menggaransi dalam bentuk regulasi berkaitan dengan perlindungan buruh migrn
4	Sarah Spencer, Susan Martin, Ivy Lynn Bourgeault dan Eamon O'Shea (2010)	<i>The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies: Report on Research Findings in the United Kingdom, Ireland, Canada and the United States</i>	Penelitian berdasarkan Studi literatur, jurnal-jurnal penelitian dan turun ke lapangan secara langsung, wawancara dan berita.	Penelitian ini membahas tentang kondisi buruh migran yang ada di Ingris, Irlandia, Canada dan Amerika serikat. Sehingga penelitian ini hampir terlihat seperti studi comperasi di 4 negara berbeda.

Dari penelitian penelitian di atas ditemukan kesamaan bahwa dalam mengadvokasi atau melindungi hak buruh migran aktor-aktor yang bermain hanyalah aktor yang berkepentingan di isu spesifik. Belum ditemukan kombinasi antar aktor yang mengakibatkan sebuah negara mengubah kebijakannya.

Hal ini yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya, dimana penelitian ini akan menggambarkan kombinasi atau kerjasama antar aktor untuk mengubah kebijakan sebuah negara walaupun aktor atau NGO tersebut tidak konsen terhadap isu yang dihadapi. Kemudian terjadi sebuah kombinasi yang menarik antara negara dan aktor-aktor internasional lainnya yang menjadikan penelitian ini mempunyai sebuah gagasan yang baru.

## F. KERANGKA TEORI

Pada pembahasan dalam penelitian ini tentunya menggunakan teori untuk membantu menjelaskan fenomena yang ada dalam memecahkan permasalahan. Sehingga Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: konsep tentang transnasional advokasi network dan Teori tentang Constructivism. Berikut penjelasan dua konsep tersebut.

### F.1 TRANSNASIONAL ADVOKASI NETWORK

Transnasional Advokasi Network merupakan sebuah bentuk organisasi yang memiliki karakteristik pertukaran serta pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar (horizontal). Konsep network tersebut dapat berjalan dengan baik karena menekankan pada hubungan yang bersifat cair dan terbuka di antara aktor-aktor yang bekerja dalam area isu-isu tertentu. Keck & Sikkink menyebut mereka sebagai *advocacy networks* karena mereka mengadvokasi dengan saling mendukung suatu perkara yang diajukan oleh yang lain. Keck & Sikkink juga menyatakan bahwa *transnational advocacy network* memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta seringkali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan<sup>3</sup>. Advokasi-advokasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor dalam sebuah *transnational advocacy network* adalah berbasis kepada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itulah, *advocacy network* menjadi penting dalam pembahasan mengenai isu-isu yang berbasis nilai-nilai seperti isu-isu hak-hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan, dan sebagainya, di mana masyarakat di berbagai penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda telah membangun satu kesamaan cara pandang terhadap isu-isu tersebut di atas.

Aktor-aktor besar dalam sebuah *advocacy networks* dapat berupa antara lain: (1) organisasi-organisasi riset & advokasi *nongovernmental* internasional dan domestik

---

<sup>3</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. *advocacy beyond border*.nd

(NGO); (2) pergerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) gereja, serikat perdagangan, organisasi konsumen, intelektual; (6) bagian dari *intergovernmental organizations* regional maupun internasional; (7) bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif dan/atau parlemen dari suatu pemerintahan.<sup>4</sup> Namun tidak semua aktor tersebut ada dalam sebuah *transnational advocacy network*. Penelitian awal yang dilakukan oleh Keck & Sikkink menyatakan bahwa NGO, baik internasional maupun domestik, memainkan peranan sentral di dalam *advocacy network*. Hal ini biasanya dikarenakan berbagai NGO tersebut seringkali berperan sebagai inisiator aksi-aksi dan menekan aktor-aktor lain yang lebih *powerful*. NGO memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melakukan lobi-lobi yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan.

*Transnational advocacy networks* tidak mengandalkan kekuatan dalam artian tradisional seperti kekuatan fisik (militer) atau kekuatan ekonomi, karena mereka memang tidak memiliki kapasitas tersebut. Dalam pengertian tradisional dari ‘*power*’ dalam arena internasional, mereka merupakan pemain yang bisa dikatakan relatif lemah. Namun dalam kenyataannya kelompok-kelompok seperti mereka tersebut memiliki pengaruh yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadikan mereka sebagai salah satu aktor yang juga patut diperhitungkan dalam arena politik internasional. Mereka memang tidak serta merta masuk ke dalam arena politik internasional tersebut, tetapi mencari cara agar isu yang mereka usung dapat menarik perhatian untuk dibahas oleh aktor-aktor tradisional. Sarana utama mereka adalah informasi yang diproduksi secara cepat, disusun secara akurat, serta disebarluaskan secara efektif.

Bentuk *transnational advocacy networks* yang berupa jejaring tidak serta merta menjadikan peranan mereka memiliki ciri khas yang unik. Karena banyak jenis jejaring lainnya yang terdiri dari individu maupun organisasi juga mampu memberikan pengaruh dalam penentuan kebijakan. Apa yang menjadikan *transnational advocacy network* menjadi penting serta memiliki keunikan tersendiri adalah advokasi yang mereka lakukan. Mereka berkampanye dengan membawa latar belakang khusus, seperti mengatasmakan kepentingan pelestarian lingkungan. Ketika sebuah dialog internasional digelar dan pada proses pembuatan keputusan tersebut hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional

---

<sup>4</sup> Ibid p9



seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka arena tersebut serta membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, *transnational advocacy networks* memfasilitasi suara dari masyarakat sipil agar dapat diperhatikan di dalam bidang politik internasional. Mereka membuka sebuah ruang demokratis di dalam arena elit.<sup>5</sup>

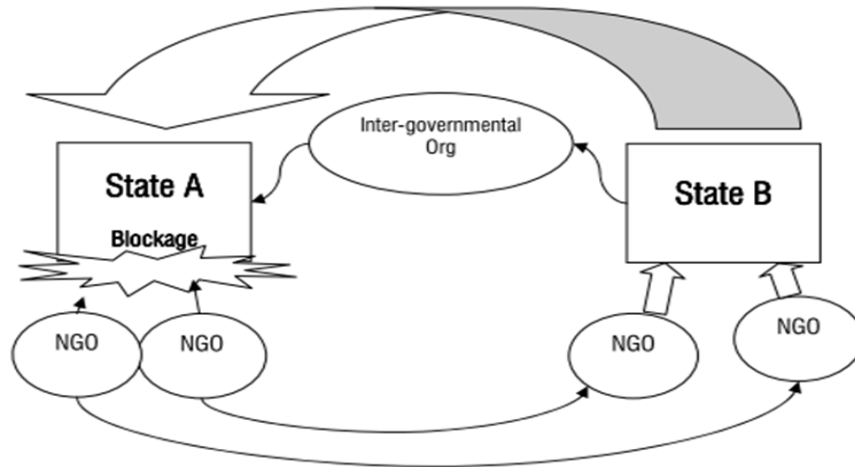
Ketika salah satu aktor di dalam suatu *network* atau jaringan memiliki sebuah visi dengan melakukan strategi politik untuk menghadapi suatu permasalahan tertentu, maka permasalahan yang diajukan tersebut berpotensi untuk mengundang aksi di dalam jaringan yang ada. Hal ini tampak ketika misalnya sebuah NGO melakukan advokasi terhadap negara tertentu dan mereka mendapatkan rintangan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Bukanlah suatu kebetulan apabila banyak NGO serta jejaring advokasi yang ada selalu menyatakan bahwa mereka mengklaim memperjuangkan hak-hak tertentu. Keck & Sikkink menyatakan bahwa pemerintah suatu negara bukan hanya merupakan penjamin utama terhadap suatu hak, tetapi juga merupakan pelanggar utama atas hak-hak tersebut.<sup>6</sup> Apabila pemerintah suatu negara enggan untuk mengakui tentang hak tersebut, kelompok-kelompok NGO yang ada seringkali memiliki rintangan untuk masuk ke dalam arena politik domestik negara yang bersangkutan. Untuk itulah mereka mengaktifkan koneksi internasional untuk mengekspresikan persoalan yang tengah dihadapi. Untuk dapat memahami lebih jelas mengenai pola hubungan antar aktor dalam sebuah jejaring *transnational advocacy network* dapat dilihat pada gambar berikut.

### Bagan 1.1

---

<sup>5</sup> "Transnational Advocacy Networks and International Policy", Center on Law & Globalization, [http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext\\_id=113](http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=113)

<sup>6</sup> Op.cit hal 12



Sumber : *Transnational Advocacy Networks and International Policy*”, Center on Law & Globalization, [http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext\\_id=113](http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=113)

Ketika saluran antara suatu negara dengan aktor domestik seperti NGO lokal terhalangi, maka muncul suatu pola bumerang yang menunjukkan karakteristik jejaring transnasional. NGO lokal akan mencari aliansi internasional untuk memperoleh dukungan serta semakin menambah tekanan dari luar terhadap negara yang bersangkutan. Tekanan dari luar tersebut bisa dari negara lain yang telah melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari NGO, serta bisa pula dari organisasi ketiga seperti inter-governmental organization. Dengan demikian, tekanan yang dihasilkan oleh pola hubungan semacam itu akan semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah negara yang sebelumnya. Jejaring transnasional telah memperkuat tuntutan dari kelompok-kelompok lokal, membuka arena terbuka terhadap isu yang diusung, dan pada akhirnya membawa tuntutan tersebut kembali ke tingkat domestik.\

Hal tersebut pulayang terjadi dengan Qatar, ketika negara-negara pengirim buruh migran berusaha bersama-sama dengan organisasi humaniter seperti human right watch, ILO, hingga amnesty internasional yang kemudian memanfaatkan pergelaran World Cup 2022 yang di selenggarakan FIFA yang akan berlangsung di Qatar.

Sudah sekian tahun organisasi-organisasi humaniter tersebut bekerjasama dengan negara-negara pengirim buruh migran untuk dapat mengubah regulasi buruh igran di Qatar namun gagal. Hingga pada akhirnya dengan pergelaran FIFA world cup 2022 usaha tersebut dapat menemui titik terang.

## F.2 TEORI KONSTRUKTIVISME

Teori konstruktivisme merupakan salah satu teori sosial yang menurut penulis mampu menjelaskan perubahan regulasi buruh migran yang dilakukan oleh Qatar.

Konstruktivisme mencakup rentang luas teori yang bertujuan menangani berbagai pertanyaan tentang ontologi, seperti perdebatan tentang lembaga (agency) dan Struktur, serta pertanyaan-pertanyaan tentang epistemologi, seperti perdebatan tentang “materi/ide” yang menaruh perhatian terhadap peranan relatif kekuatan-kekuatan materi versus ide-ide. Konstruktivisme bukan merupakan teori HI, sebagai contoh dalam hal neo-realisme, tetapi sebaliknya merupakan teori sosial. Konstruktivisme dalam HI sebagai konstruktivisme “konvensional” dan “kritis”. Hal yang terdapat dalam semua variasi konstruktivisme adalah minat terhadap peran yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ide. Konstruktivisme menggambarkan hubungan internasional teori konstruktivis sebagai peduli dengan bagaimana ide-ide define struktur internasional, bagaimana struktur ini mendefinisikan kepentingan dan identitas negara-negara dan bagaimana negara-negara dan aktor non-negara mereproduksi struktur ini. Prinsip utama dari konstruktivisme adalah keyakinan bahwa "politik Internasional dibentuk oleh ide-ide persuasif, nilai-nilai kolektif, budaya, dan identitas sosial". Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas internasional secara sosial dikonstruksi oleh struktur kognitif yang memberikan makna terhadap dunia material. Teori ini muncul dari perdebatan tentang metode ilmiah dari teori-teori hubungan internasional dan peran teori dalam produksi kekuasaan internasional.<sup>7</sup>

Kehadiran konstruktivisme dianggap sebagai teori dinamis, dan secara kultural berbasis pada kondisi-kondisi sosial. Pada dasarnya, teori ini berasumsi pada pemikiran dan pengetahuan manusia secara mendasar. Nature dan human knowledge dari tiap individu mampu mengubah fenomena atau realita sosial ke dalam pengetahuan atau ilmu-ilmu sosial. Tokoh pemikiran konstruktif klasik berasal dari pemikir sosial seperti Hegel,

---

<sup>7</sup> Wendt, Alexander E. 1987. *The Agent-Structure Problem in International Relations Theory. International Organization*,

Kant, dan Grotius, yang kental dengan paham idealisme. Sedangkan pasca Perang Dingin, mulai bermunculan para konstruktivis yang cenderung berpikir tentang politik internasional, yakni Karl Deutch, Ernst Haas dan Hedley Bull.

Pemikir konstruktivisme dalam HI memiliki pandangan yang berbeda-beda (Mingst, 2011:84). Satu hal yang menjadi sebuah kesamaan oleh semua para pemikir konstruktivis adalah tidak adanya kepentingan (baik individu, negara maupun komunitas internasional) yang ada dengan sendirinya (given) dan tetap seperti itu adanya contoh misalnya, pemikiran realis yang mengatakan bahwa kepentingan utama sebuah negara adalah survival. Menurut konstruktivis, kepentingan terbentuk melalui interaksi sosial yang konstan. Dalam pandangan konstruktivisme, kekuasaan juga penting. Namun konstruktivis tidak membatasi kekuasaan hanya yang ada di dimensi material. Kekuasaan tidak hanya sekedar militer, jumlah penduduk, persenjataan, ekonomi, namun juga wacana seperti gagasan dan legitimasi.<sup>8</sup>

Dalam penemuannya konstruktivisme mempunyai beberapa asumsi-asumsi dasar, beberapa asumsi tersebut diantaranya: pertama Structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces (Wendt, 1999)<sup>9</sup>Pemahaman ini bukan berarti bahwa struktur material tidak penting dan tidak perlu ada. Hanya saja, struktur idea/intersubyektivitas lebih penting karena struktur ini lah yang memberikan arti/meaning terhadap struktur material. Kuda yang berwarna hitam, akan menjadi sekedar “onggokan materi” tidak berarti jika tidak diberikan meaning oleh struktur pengetahuan yang kita terima sejak kecil. Bahwa yang memiliki bentuk seperti itu adalah kuda dan bahwa hitam adalah warna dengan ciri-ciri tertentu.

Dalam ranah HI, analogi yang sama bisa dikenakan pada pemahaman tentang struktur internasional yang anarki. Mengapa sistem internasional disebut anarki? Itu karena adanya intersubyektivitas /struktur meaning di pemikiran kita yang “menyepakati” bahwa memang strukturnya anarki (coba anda tidak belajar realisme, tentu anda tidak peduli apakah sistem internasional anarki atau tidak, karena anda bukan bagian dari intersubyektivitas tersebut). Apakah dengan demikian struktur internasionalnya itu

---

<sup>8</sup>Jackson, Robert dan George Sorensen, terj. Dadan Suryadipura. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 307.

<sup>9</sup>Wendt, Alexander E.1987. *The Agent-Structure Problem in International Relations Theory. International Organization*,

sendiri tidak ada, dan yang ada hanya “ide” tentang struktur internasional? Tidak. Struktur internasionalnya memang ada. Ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa struktur internasional memang ada. Namun, struktur tersebut tidak berarti apa-apa tanpa struktur of idea/meaning yang memberikan arti kepadanya. Dengan kata lain, “Anarchy is what states make of it” (Wendt, 1992,1999).

Termasuk juga perilaku negara di dalam struktur yang anarki. Dalam pandangan konstruktivisme, prinsip “self help”, seperti yang dipikirkan oleh realisme, pada dasarnya juga dipengaruhi oleh intersubektivitas dan identitas yang dibentuk oleh negara (yang kedua akan kita bahas juga di asumsi dasar kedua).

Karena sistem internasional anarki dan hanya kita yang diandalkan untuk melindungi diri, bukan berarti bahwa perilaku semua negara terhadap negara lainnya sama: curiga dan konfliktual. Pembentukan identitas diri cukup mempengaruhi bagaimana negara merespon “ancaman” dari negara lain. Negara jelas berperilaku berbeda terhadap teman dan terhadap lawan karena tentu saja lawan dianggap lebih “mengancam” daripada teman. Contoh Amerika Serikat akan lebih khawatir dengan 5 nuklir yang dimiliki oleh Iran daripada 500 nuklir yang dimiliki perancis karena kita tahu bahwa perancis adalah sekutu Amerika Serikat dan Iran adalah musuhnya.

Kemudian asumsi yang kedua adalah *Identities and interests of actors are constructed by these shared ideas rather than given by nature* (Wendt, 1999) .Shared ideas, dalam pandangan konstruktivisme, adalah yang membentuk identitas. Meskipun pembentukan identitas sendiri sebagian besar dilakukan oleh sekelompok elit pembuat kebijakan, namun pembentukan identitas tersebut merupakan respon terhadap shared ideas/pemahaman intersubektivitas. Seperti dianalogikan oleh Wendt (1992:397): “Jika masyarakat ‘lupa’ apa yang dinamakan universitas, maka kekuasaan dan kegiatan profesor serta mahasiswa menjadi tidak lagi eksis; demikian juga ketika Amerika Serikat dan Uni Sovyet memutuskan bahwa mereka tidak lagi musuh, maka Perang Dingin akan usai”

Identitas, menurut Wendt, akan didapatkan pula oleh aktor dengan ikut serta dalam pembentukan shared ideas/pemahaman intersubektivitas tersebut. Identitas diartikan sebagai “relative stable, role-specific understanding and expectation about self”. (Wendt, 1992: 397). Wendt juga mengatakan bahwa identitas merupakan kepentingan

mendasar dari sebuah negara yang bisa didapat melalui proses mendefinisikan sesuatu. Identitas yang mendasari kepentingan sebuah negara inilah kemudian yang “mengatur” perilaku negara. Contoh Korea Utara dan Korea Selatan ketika perang dingin mempunyai kekuatan materi berupa militer dan ekonomi yang seimbang, tetapi identitas seperti ideologi dan persepsi yang berbeda tentang kawan dan lawan membuat Korea selatan berada di pihak AS dan Korea utara di pihak lawannya, Soviet

Lalu asumsi ketiga adalah *Agents and structures are mutually constitutive* (Wendt, 1999) Jika realisme berpendapat bahwa struktur internasional adalah abadi, tidak berubah dan selamanya anarkis, maka konstruktivisme berpendapat bahwa agent dan struktur saling mempengaruhi. Artinya, konstruktivisme membuka peluang perubahan terhadap struktur internasional, jika unit (dalam hal ini negara) mempengaruhi struktur untuk berubah. Konstruktivisme berpendapat bahwa baik agent maupun struktur saling mempengaruhi satu sama lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konstruktivisme merupakan sebuah pemikiran yang penting dalam Sosiologi terutama dalam Sosiologi institusional. Namun di dalam Hubungan Internasional, konstruktivisme hadir untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada. Pemikiran kunci dari konstruktivisme adalah dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia. Terdapat tema-tema seperti negara dan power, institusi dan tatanan dunia, identitas dan komunitas, perdamaian dan keamanan yang dapat dianalisa dalam kerangka pemikiran konstruktivisme.

Melihat penjelasan diatas tentusaja sangat penting bagi aktor-aktor yang berkepentingan dalam regulasi buruh migran di Qatar untuk “mengkonstruksi” pemikiran Qatar tentang buruh migran. Penting tentunya membedakan pandangan Qatar tentang apa itu Buruh migran sebelum terkonstruksi oleh aktor-aktor berkepentingan dan sesudah terkonstruksi. Tentusaja hal tersebut merupakan konstruksi yang luarbiasa dari aktor berkepentingan ketika bisa mengubah perilaku negara Qatar dalam menanggapi buruh migran. Karena seperti yang di jelaskan oleh Alexander wendt bahwa norma akan sangat berpengaruh terhadap perilaku sehingga dalam kaitannya dengan perilaku Qatar terhadap buruh migran tidak lepas dari norma yang di tekankan oleh aktor berkepentingan terhadap Qatar.

## G. HIPOTESA

Dengan melihat pada kompleksitas masalah tentang buruh migran di Qatar dan mengapa Qatar mengubah kebijakan tentang buruh migran, penulis memiliki kesimpulan awal bahwa Qatar mengubah kebijakan buruh migran karena :

1. Semakin kompetitifnya nilai-nilai norma Internasional.
2. Desakan dari beberapa organisasi humaniter dan organisasi buruh internasional

## H. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian digunakan sebagai salah satu metode bagi penulis dalam memperoleh data yang diperuntukan untuk menulis thesis ini. Metodologi penelitian mencakup beberapa aspek yang akan dijelaskan penulis di bawah ini :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi dan eksplanasi. Metode eksplanasi bertujuan untuk menjawab sebab akibat secara jelas dan keseluruhan. Sedangkan deskripsi bertujuan untuk menjelaskan alur kebijakan pada masing-masing negara. Sehingga di harapkan penelitian ini dapat di pahami permasalahnya dari hulu hingga hilir oleh siapa saja termasuk pemerintah maupun para peneliti lain yang ada di Indonesia.

### 2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Lokasi penelitian secara kualitatif yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta pada periode Agustus sampai Desember 2015. Lokasi penelitian tersebut dilaksanakan diantaranya di Kedutaan Qatar, Kedutaan Arab Saudi, Kementerian Luar negeri Indonesia, Kemenakertrans, dan BNP2TKI.

Selain di instansi yang di rasa penting untuk di kunjungi penelitian ini juga dilakukan di Laboratorium UMY, Kantor MIHI dan perpustakaan UMY.

Selain menggunakan data internet untuk meakses data-data yang dianggap penting penulis juga aktif mengakses mediaa masa terkatit dengan pemberitaan-pemberitaan yang up to date. Walaupun janggauan penelitian ini di batasi mulai tahun 2005 hingga 2015 namun penulis merasa perlu mengakses UU yang ada sebelum tahun 2004.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di lakukan secara langsung dan tak langsung. Secara langsung pengumpulan data berasal dari observasi, questioner dan wawancara tokoh yang memiliki kemampuan pada bidang atau salah satu bidang yang di pandang penting dalam riset ini. Pengumpulan data secara tidak langsung akan di lakukan secara *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan menyangkut dengan penelitian yang sedang di lakukan. *library research* dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, laporan instansi terkait, berita cetak dan elektronik, webside resmi pemerintah yang bertanggung jawab dan berbagai sumber lain yang dipandang perlu dalam penelitin ini. Berhubung penelitian ini adalah deskripsi dan ekspalanasi maka validitas harus sangat jelas dalam menampilkan permasalahan yang terjadi baik dari hulu hingga ke hilir. Sehingga dalam hal ini peneliti

#### a. Dokumen

Dokumen dalam artian segala sesuatu data tertulis dan gambar yang menyangkut permasalahan yang sedang di teliti. Dokumen melibatkan referensi-referensi yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang di teliti di antaranya adalah laporan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh ILO, Amensty Internasional, Human Right Watch, IOM dan penelitian lainnya. Penulis juga akan lebih menekankan pada conten analisis terhadap beberapa laporan yang tersedia. Selain itu penulis juga mengidentifikasi beberapa undang-undang seperti undang-undang ketenagakerjaan Qatar tahun 2004, konvensi buruh migran dan lain lain.



Selain itu penulis juga menganalisis berbagai laporan yang menggunakan metodologi yang tepat yang dirasa penulis relevan untuk tulisan ini. Laporan International Organization for Migration tentang *Migrasi Tenaga Kerja Indonesia* di Tahun 2014 menjadi salah satu laporan yang diteliti oleh penulis, selain itu laporan dari Human Right Watch tentang *I already brought You Abuse and Exploitation of Female Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates* yang bercerita tentang laporan peneliti Human Right Watch mengenai gambaran sistem buruh migran di Timur Tengah pada umumnya dan Uni Emirat Arab pada khususnya. Kemuadian laporan dari Amnesty International tentang kondisi dan pelanggaran buruh migran di Qatar juga dipandang relevan untuk penelitian ini. Kemudian salah satu Journal yang di tulis oleh Prof Liliana A Barria dan DR steven Ropper tentang *understanding variation in gulf migration and labor practice 2014*. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis untuk lebih bisa mengexplanasi tentang topik yang ingin di teliti.

b. Observasi

Observasi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data-data primer secara langsung dan objective dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Informan akan di pilih berdasarkan kemampuan khusus yang di miliki personal atau institusi terkait. Sehingga dalam hal ini pemerintah terkait, dan ilmuwan yang berkopetensi dengan timur tengah. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara ke beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut diantaranya dari pihak Kedutaan Qatar, kedutaan Arab Saudi, kemudian BNP2TKI, Kemenakertrans, dan Kemlu.

### **Kedutaan Qatar**

Instansi ini merupakan suber utama dalam penelitian ini karena instansi inilah yang di rasapaling mampu menjelaskan gambaran tentang Qatar baik dari segi bangunan yang ada di sana maupun informan yang tersedia. Meskipun tidak dapat bertemu dengan Duta Besar Qatar namun kehadiran staf kedutaan dirasa sudah cukup untuk melengkapi informasi tentang Qatar. Meskipun dari segi

dokumentasi agak sulit untuk mendapatkannya karena ketatnya peraturan kedutaan.

### **Kedutaan Arab Saudi**

Instansi ini dirasa juga penting bagi penulis karena penulis juga melakukan pengkajian secara terbatas mengenai Arab Saudi sehingga informasi secara langsung mengenai Arab Saudi juga dirasa penting. Meskipun hanya menjumpai staf namun informasi yang di dapat sedikit banyak membantu penelitian ini terutama ketika penulis menjumpai situasi kondisi di kedutaan.

### **BNP2TKI, Kemenakertrans dan Kemlu**

Ketiga instansi dalam negeri Indonesia tersebut dikunjungi oleh penulis dalam rangka pematangan materi dan untuk memperkaya data. Mengapa instansi ini perlu dikunjungi karena dari instansi ini penulis dapat mengkonfirmasi data dan kebijakan yang relevan terhadap kasus di timur tengah. Data tersebut diperlukan karena ini berkaitan dengan peran aktor internasional dalam mengubah kebijakan sebuah negara. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana peran Indonesia dalam melakukan perlindungan TKI di timur tengah. Di Kemlu penulis juga mendapat banyak informasi tentang timur tengah karena selain bertemu dengan direktur perlindungan WNI pak Lalu Muhamad Iqbal penulis juga bertemu dengan staf hukum kedutaan yang tinggal di timur tengah selama kurang lebih 10 tahun, sehingga di instansi ini penulis mendapat cukup banyak data primer mengenai Indonesia dan Timur tengah.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Penulisan analisa data akan di lakukan secara kualitative. Sehingga dalam hal ini akan mendapatkan hasil yang lebih akurat dan bisa saling melengkapi satu sama lain untuk menarik sebuah kesimpulan akhir.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu: Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas lebih umum mengenai subjek yang dalam hal ini adalah aktor-aktor yang terlibat secara langsung. Aktor-aktor tersebut di antaranya adalah negara-negara teluk yang mempunyai aturan tersendiri tentang buruh migran dan regulasi bersama yang mereka miliki tentang buruh migran.

Bab III akan lebih membahas tentang masalah-masalah yang menyangkut buruh migran di Qatar, regulasi buruh migran di Qatar hingga regulasi buruh migran yang ada di Qatar beserta perubahannya.

Bab IV akan menganalisa baik secara deskripsi maupun explanasi mengenai kebijakan-kebijakan yang menyebabkan Qatar mengubah regulasi buruh migran yang tadinya bersifat kaku dan penuh dengan celah pelanggaran. Analisa tersebut akan di dukung oleh data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Bab V adalah kesimpulan dari penelitian ini